

# Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa dimediasi oleh Pengelolaan Dana Desa

**Afri Anton<sup>1</sup>, Taufeni Taufik<sup>2</sup>, Ruhul Fitrios<sup>3</sup>, Yesi Mutia Basri<sup>4</sup>**  
<sup>1,2,3,4</sup>Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau  
[afri.anton1724@grad.unri.ac.id](mailto:afri.anton1724@grad.unri.ac.id), [taufeni.taufik@lecturer.unri.ac.id](mailto:taufeni.taufik@lecturer.unri.ac.id),  
[ruhul.fitrios@lecturer.unri.ac.id](mailto:ruhul.fitrios@lecturer.unri.ac.id), [yesimutiabasri@lecturer.unri.ac.id](mailto:yesimutiabasri@lecturer.unri.ac.id)

## ABSTRACT

*This study aims to find empirical evidence of the Influence of Village Official Competence, Organizational Commitment and Transparency on Village Government Performance with Village Fund Management as a Mediator. This research was conducted at Village Government Officials in Padang Pariaman Regency. The sampling technique uses the census method by sending questionnaires to Village Government Officials. Of the 309 questionnaires distributed, 288 questionnaires were processed using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) analysis. The results of the research prove that there is an influence of Village Official Competence, Organizational Commitment and Transparency on Village Government Performance and Village Fund Management which is able to mediate the variables of Village Official Competency, Organizational Commitment and Transparency on Village Government Performance of Village Government Officials in Padang Pariaman Regency. By having qualified & competent Village Officials, the implementation of Village Fund Management can run well & smoothly (starting from planning, implementation, administration, reporting to accountability). Transparency as openness of public information has a very important role in increasing public participation, if there is public involvement in controlling & supervising the implementation of regional government then the performance produced by the government will run well. Good Village Fund Management can influence Village Government Performance, where the better the rules implemented by village officials, the better the Village Government Performance will be.*

**Keywords:** *Organizational Commitment; Transparency; Village Fund Management; Village Government Performance; Village Official Competence;*

## PENDAHULUAN

Anggaran desa bertujuan untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas pendanaan terhadap desa (Wardani & Andriyani, 2017). Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintah pusat telah menyerahkan wewenang seutuhnya kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah pusat & pemerintah daerah berperan menjadi fasilitator dalam memberikan bantuan dana serta melakukan pembinaan untuk mendukung pembangunan desa. Sistem penyelenggaraan pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakatnya yang dalam pelaksanaan tugas pembangunan & penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah desa harus benar-benar memperhatikan hubungan kerja yang baik dengan seluruh aparat pemerintahan yang ada didesa harus benar-benar memahami kewenangan masing-masing, sehingga semua aparat desa dapat bersinergi dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional (Nurhazizal, Basri & Nasir, 2019).

Banyak ditemukan kritik terhadap kinerja pemerintah desa. Lambannya kinerja aparat desa dalam mengurus keperluan administrasi cenderung melelahkan & dinilai kurang efektif, efisien serta ekonomis. Pelayanan yang baik sangat diharapkan oleh masyarakat didesa, namun pada kenyataannya pelayanan yang diberikan masih jauh dari memuaskan, khususnya pelayanan dalam pembuatan surat-menyurat. Masyarakat desa sering tidak dilayani dengan baik & sulit menemui kepala desa (Nurhazizal, Basri & Nasir, 2019). Permasalahan yang pernah terjadi, adanya pemotongan (Jawa Timur); penyimpangan (NTT); masalah administratif (birokrasi penyaluran

dana yang berbelit, tidak lengkapnya dokumen yang disyaratkan; kurangnya pengetahuan aparat desa; kurangnya pendampingan & kualitas pendamping; serta minimnya pengawasan) (Lengkong & Tasik, 2018). ICW menuliskan teridentifikasi tujuh bentuk korupsi pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, laporan fiktif, pemotongan anggaran & suap (Ash-shidiqq & Wibisono, 2018). Hasil pengamatan TA 2017 s/d 2021 atas LK Kab. Padang Pariaman didapatkan hasil kelima desa tersebut dinilai belum optimal dalam mengelola anggaran dana desa terlihat dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang masih tinggi & dinilai masih fluktuatif. Tingginya SILPA mengindikasikan bahwa belum efektifnya anggaran yang disusun, baik dari proses penganggaran hingga pelaksanaan anggaran, karena terdapat kesenjangan anggaran dilihat dari sisi Pendapatan maupun Belanja. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka banyak faktor yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah.

Faktor pertama Kompetensi Aparat Desa merupakan kemampuan aparat desa dalam menciptakan dengan menggunakan energi tertinggi. Organisasi harus memiliki aparat desa yang kompeten didukung dengan latar pendidikan akuntansi, ikut diklat, serta pengalaman bidkeu (Lubis, 2020). Rulyanti, Sularso & Sayekti (2017); Munti & Fahlevi (2017); Fitria & Wibisono (2019) serta Lubis, Sari & Astuty (2020) menyatakan Kompetensi Aparat Desa berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa. Semakin tinggi kompetensi Aparat desa maka semakin tinggi pula kinerja organisasi. Namun Ramadhan & Widajantie (2022); serta Nurhazizal, Basri & Nasir (2020) tidak sependapat.

Faktor kedua Komitmen Organisasi merupakan kondisi psikologis untuk mengkoneksikan hubungan karyawan dengan organisasi & mempengaruhi keputusan karyawan untuk melanjutkan atau berhenti dari organisasi (Yateno, 2020). Aparat desa harus memiliki komitmen organisasi yang kuat (Lubis, 2020). Komitmen Organisasi dapat memberikan manfaat terhadap Kinerja (Diana & Anggreani, 2020). Seseorang yang berkomitmen pada organisasi dikenali dengan adanya prinsip yang intens atas sasaran organisasi, adanya tekad akan tetap bertahan di organisasi & mengoptimalkan performanya dalam mencapai sasaran organisasi (Medianti, 2018). Rulyanti, Sularso & Sayekti (2017) menyatakan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa. Namun Pratama, Lestari & Pratiwi (2022), serta Fitria & Wibisono (2019) tidak sependapat.

Faktor ketiga Transparansi merupakan keterbukaan pemimpin dalam membuat kebijakan pengelolaan keuangan sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana pemimpin dalam suatu tahun anggaran tertentu (Mardiasmo, 2018). Pemerintah Desa proaktif memberikan kemudahan akses informasi (Bawono, 2019). Transparansi merupakan faktor yang mempengaruhi efektifitas kinerja (Solihat, 2017). Aparat desa harus memiliki Transparansi (Lubis, 2020). Pratama, Lestari & Pratiwi (2022) menyatakan transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa. Namun Kholifah (2020), Sukmawati & Nurfitriani (2019) tidak sependapat.

Kinerja Pemerintah Desa dengan faktor diatas masih harus diperkuat dengan variabel Pengelolaan Dana Desa (kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, & pertanggungjawaban). Pengelolaan Dana Desa sangat penting dilaksanakan oleh aparat desa, dimana untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa salah satunya dengan cara melakukan pengelolaan lebih transparan, akuntabel, & partisipatif serta sesuai peraturan yang berlaku. Semakin baik & berkualitasnya aparat desa, komitmen organisasi, & transparansi, maka akan meningkatkan Pengelolaan Dana Desa. Dengan meningkatkan Pengelolaan Dana Desa maka kinerja pemerintah desa juga semakin optimal (Lubis, Sari & Astuty, 2020). Riset bertujuan menguji kembali variabel Kompetensi Aparat Desa, Komitmen Organisasi & Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Desa, objek penelitian Aparat Desa Kab. Padang Pariaman, alat analisis Smart PLS.

## STUDI LITERATUR

### *Teori Stewardship (Stewardship Theory)*

Teori *Stewardship* ialah teori yang menempatkan kepentingan masyarakat (*agent*) sebagai prioritas yang harus dilakukan, sehingga sektor publik dituntut untuk selalu berorientasi pada

perbaiki kinerja secara terus menerus untuk kepentingan organisasi (*steward*) (Faridani, 2021). Implikasi teori *Stewardship* pada penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi aparat desa untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas & fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka dalam hal ini aparat desa mengarahkan semua kemampuan & keahliannya dengan komitmen organisasi yang kuat dengan mengutamakan transparansi dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Desa. Kinerja Pemerintah Desa yang baik harus didukung oleh Kompetensi Aparat Desa yang memadai, diikuti dengan Komitmen Organisasi yang tinggi, & adanya Transparansi agar tercapai kinerja yang maksimal dari pemerintah desa.

#### *Teori Agensi (Agency Theory)*

Teori *Agency* menjelaskan bahwa terdapat hubungan berdasarkan suatu perjanjian antara para pihak yang berkepentingan dalam organisasi antara (*agent*) yaitu Pengelola Dana Desa dengan (*principal*) yaitu masyarakat. Hubungan teori agensi dengan Kinerja Pemerintah Desa yaitu *principals* memberikan kepercayaan kepada *agent* untuk mengelola Dana Desa. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principals* adalah rakyat & *agent* adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala daerah & aparat daerah lainnya. Dalam mengelola Dana Desa, kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, & mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principals*) yang memiliki hak & kewenangan meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam Pengelolaan Dana Desa, organisasi berkewajiban untuk menjelaskan & mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemberi amanah (Budiarto, 2020). Dalam teori *Agency* akan terdapat perselisihan antara kepentingan *principal* dengan kepentingan *agent*. Oleh karena itu diperlukan Pengelolaan Dana Desa yang baik sehingga kepentingan masyarakat dapat diwujudkan. Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh Kompetensi Aparat Desa, Komitmen Organisasi, & Transparansi dengan diperkuat oleh Pengelolaan Dana Desa, yang berjalan dengan melibatkan peran Aparat desa (Agustiningsih, 2017).

#### *Kinerja Pemerintah Desa*

Kinerja Pemerintah Desa merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) secara langsung maupun tidak langsung (Lubis, 2020). Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien & efektif atau untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keseluruhan organisasi. Kinerja dapat dihitung & diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai & berfungsi. Dengan adanya indikator, suatu organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana organisasi tersebut dikatakan berhasil atau tidak berhasil di masa mendatang. Sari & Indriani (2018), mengelompokkan indikator kinerja dari sisi keuangan berdasarkan kategori 3E yaitu: ekonomi, efisiensi & efektivitas. Indikator untuk pengukuran kinerja pemerintah di Indonesia dapat dilihat dari *value for money* yaitu konsep pengelolaan organisasi sektor publik berdasarkan tiga elemen utama tersebut (Lubis, 2020).

#### *Kompetensi Aparat Desa*

Kompetensi merupakan kombinasi dari keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) serta perilaku yang dapat diamati & diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi berprestasi serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya (Mada, 2017). Lubis (2020); Aziiz & Prastiti (2019); Sapartiningsih (2018); & Rulyanti (2017) menyatakan bahwa Kompetensi Aparat Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.

**H<sub>1</sub>: Kompetensi Aparat Desa berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa.**

#### *Komitmen Organisasi*

Komitmen Organisasi ialah kondisi psikologis untuk mengkoneksikan hubungan karyawan terhadap organisasi & mempengaruhi keputusan mereka untuk lanjut atau menyerah dari organisasi

(Yateno,2020). Kholifah (2020) menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

**H<sub>2</sub>: Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa.**

*Transparansi*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi (Indradi,2017). Kusumah, Vabiani & Ardiharsa (2019) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

**H<sub>3</sub>: Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa.**

*Pengelolaan Dana Desa*

Pengelolaan Dana Desa merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Permendagri No. 20 TA 2018). Indikatornya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban. Adanya pengelolaan dana desa yang baik diharapkan dapat mempengaruhi kinerja pemerintah desa, dimana semakin tinggi aturan yang diterapkan oleh perangkat desa maka akan meningkatkan kualitas kinerja perangkat desa (Lubis, 2020; Rulyanti, 2017). Kepala desa harus memiliki aparat desa yang berkualitas (Aziiz & Prastiti, 2019; Yesinia & Sapartiningsih, 2018; Rulyanti, 2017). Komitmen Organisasi adalah salah satu faktor yang harus dimiliki seseorang dalam organisasi untuk mewujudkan pengelolaan yang baik (Giriani, 2021; Zulkifli, 2020; Hardiningsih, 2020; Sarah, 2020; Suciningtyas, 2019). Dengan transparansi yang baik, maka Pengelolaan Dana Desa juga akan baik. Ketika aparat desa terbuka dengan masyarakat, maka aparat desa dalam melakukan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat juga secara maksimal.

**H<sub>4</sub>: Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa.**

**H<sub>5</sub>: Kompetensi Aparat Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.**

**H<sub>6</sub>: Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.**

**H<sub>7</sub>: Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.**

## METODE

Populasi penelitian sebanyak 103 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Metode sampel yang digunakan metode sensus (*non probability sample*) & responden responden tiap desa (Permendagri No. 8 TA 2021) yaitu: Kepala Desa, Sekretaris Desa & Bendahara Desa sehingga diperoleh 309 responden. Jenis data ialah data kuantitatif. Sumber data ialah data primer dari kuesioner. Metode analisis data ialah program *SmartPLS 3.0*. Variabel diukur dengan 5 point skala likert. Skala 1 “sangat rendah” & skala 5 “sangat tinggi”. Pengukuran Kinerja Pemerintah Desa dengan 3 indikator mengacu pada Lubis (2020), Kompetensi Aparat Desa diukur dengan 3 indikator mengacu kepada Mada (2017), Komitmen Organisasi diukur dengan 3 indikator mengacu pada Yateno (2020), Transparansi diukur dengan 4 indikator mengacu pada Indradi (2017). Terakhir variabel Pengelolaan Dana Desa diukur mengacu Permendagri No. 20/2018 dengan 5 indikator.

## HASIL

***Discriminant Validity, Cronbach Alpha, Composite Reliability, & AVE***

*Discriminant validity (cross loading)* dari tabel 1 dapat diketahui bahwa seluruh item memiliki angka *cross loading* pembentuk konstruk masih lebih besar pada masing-masing variabel dibandingkan angka *loading* pada variabel lainnya. Nilai *loading* faktor pada item masing-masing variabel masih lebih besar terhadap variabel atau indikator masing-masing. Nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel lebih besar dari 0.7, maka dapat dinyatakan bahwa variabel-variabel yang digunakan sudah reliabel. Untuk angka *composite reliability* masing-masing variabel yang digunakan lebih besar dari 0.7, maka variabel-variabel tersebut yang termasuk kategori *reliability* tinggi. Validitas diskriminan dengan menggunakan angka *Average Variance Extracted (AVE)* lebih besar dari 0.5.

Tabel 1. Hasil *Discriminant Validity, Cronbach Alpha, Composite Reliability, & AVE*

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted(AVE)
X1 (Kompetensi Aparat Desa)	0.948	0.955	0.658
X2 (Komitmen Organisasi)	0.933	0.943	0.624
X3 (Transparansi)	0.899	0.918	0.585
Y (Kinerja Pemerintah Desa)	0.936	0.945	0.633
Z (Pengelolaan Dana Desa)	0.944	0.950	0.561

Sumber: Hasil Olahan Data, 2023

### Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 2. Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengaruh	R Square
X1, X2, X3 → Z	0.417
X1, X2, X3, Z → Y	0.393

Sumber: Hasil Olahan Data, 2023

Nilai *R-Squared* Kinerja Pemerintah Daerah pada tabel 2 sebesar 0,393 artinya pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi & Pengelolaan Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintah Daerah ialah sebesar 39,3% sedangkan sisanya yaitu 60,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Sedangkan Nilai *R-Squared* Pengelolaan Dana Desa pada tabel 3 sebesar 0,417 artinya pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Komitmen Organisasi & Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa ialah sebesar 41,7% sedangkan sisanya yaitu 58,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

### Hasil Effect Size ( $F^2$ )

Nilai *F-Square* (tabel 3) mengindikasikan *effect size* atau proporsi keragaman variabel eksogen terhadap endogen. Kategori koefisien *F-Square* adalah kategori kecil untuk *F-Square* antara 0.02 hingga 0.15, kategori sedang untuk *F-Square* antara 0.15 hingga 0.35, & kategori besar untuk *F-Square* lebih dari 0.35.

Tabel 3. Hasil Effect Size

Eksogen	Model 1 (Z)		Model 1 (Y)	
	F square	Efek	F square	Efek
X1 (Kompetensi Aparat Desa)	0.234	Sedang	0.052	Kecil
X2 (Komitmen Organisasi)	0.137	Kecil	0.068	Kecil
X3 (Transparansi)	0.141	Kecil	0.050	Kecil
Z (Pengelolaan Dana Desa)			0.076	Kecil

Sumber: Hasil Olahan Data, 2023

### Hasil Predictive Relevance ( $Q^2$ )

Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan rumus:

$$Q^2 = 1 - [(1 - R1^2) \times (1 - R2^2)]$$

$$Q^2 = 1 - [(1 - 0.417) \times (1 - 0.393)] = 0.646$$

Hasil perhitungan *Q-Square* mengindikasikan keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 0.646 atau sebesar 64.6%. Model termasuk kategori model baik (> 0).

### Hasil Goodness of Fit Index (GoF)

Pengujian *Goodness of Fit* model dilakukan untuk melihat ketepatan model secara keseluruhan dengan mengalikan rata-rata nilai koefisien determinasi dengan rata-rata nilai *communality* (AVE) nya.

$$GoF = \sum \sqrt{AVE \times R^2}$$

$$GoF = \sqrt{\left(\frac{0.561 + 0.633}{2}\right) \times \left(\frac{0.417 + 0.393}{2}\right)}$$

$$GoF = \sqrt{0.597 \times 0.405} = 0.492$$

Hasil perhitungan GoF sebesar 0.492, disimpulkan model termasuk kategori besar (> 0.36).

### Hypothesis Test Result

Tabel 4. Hypothesis Test Result

Pengaruh	Koefisien jalur	T statistics	p-values	Keterangan
X1 → Z	0.382	6.325	0.000	Signifikan
X2 → Z	0.287	4.545	0.000	Signifikan
X3 → Z	0.295	6.161	0.000	Signifikan
X1 → Y	0.203	3.500	0.001	Signifikan
X2 → Y	0.219	3.962	0.000	Signifikan
X3 → Y	0.192	2.786	0.006	Signifikan
Z → Y	0.282	3.657	0.000	Signifikan

Sumber: Hasil Olahan Data, 2023

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) diterima, nilai T- statistics lebih besar dari *critical value* (3.500 > 1.96), dan p-values lebih kecil dari α (0.001 < 0.050), sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Aparat Desa berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan Lubis (2020) namun berbeda dengan Ramadhan & Widajantie (2022). Dengan adanya Aparat Desa yang berkualitas & kompeten maka pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dapat berjalan dengan baik & lancar (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban).

### Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) diterima, nilai T-statistics lebih besar dari *critical value* (3.962 > 1.96), dan p-values lebih kecil dari α (0.000 < 0.050), sehingga dapat disimpulkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa. Hasil ini mendukung Ardianty, Utami & Pardanawati (2022); Rulyanti, Sularso & Sayekti (2017) namun berbeda dengan Pratama, Lestari & Pratiwi (2022). Komitmen organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi karena komitmen menunjukkan keberpihakan seseorang terhadap suatu organisasi sehingga dapat melakukan tugas & tanggung jawab secara baik serta maksimal.

### Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) diterima, nilai T-statistics lebih besar dari *critical value* (2.786 > 1.96), dan p-values lebih kecil dari α (0.006 < 0.050), sehingga dapat disimpulkan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa. Hasil ini mendukung Pratama, Lestari & Pratiwi (2022); Perti (2020); serta Istiqomah (2017) namun berbeda dengan Kholifah (2020), Sukmawati & Nurfitriani (2019) dimana Transparansi sebagai keterbukaan informasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi publik, adanya keterlibatan publik dalam mengontrol & mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut maka kinerja yang dihasilkan pemerintah akan berjalan dengan baik.

### Pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Hipotesis keempat (H<sub>4</sub>) diterima, nilai T-statistics lebih besar dari *critical value* (3.657 > 1.96), dan p-values lebih kecil dari α (0.000 < 0.050), sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa. Hasil ini sejalan dengan Lubis (2020) & Rulyanti (2017), Pengelolaan Dana Desa yang baik dapat mempengaruhi Kinerja

Pemerintah Desa, dimana semakin baik aturan yang diterapkan oleh aparat desa maka akan meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa.

### **Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Hipotesis kelima ( $H_5$ ) diterima, nilai T-statistics lebih besar dari *critical value* ( $6.325 > 1.96$ ), dan p-values lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0.000 < 0.050$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Aparat Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa. Hasil ini sejalan dengan Aziiz & Prastiti (2019), dimana perlunya dilakukan pengoptimalisasian sumber daya manusia dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya karena hal ini akan berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa. Aparat Desa yang berkompeten akan melakukan Pengelolaan Dana desa dengan professional.

### **Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Hipotesis kelima ( $H_6$ ) diterima, nilai T-statistics lebih besar dari *critical value* ( $4.545 > 1.96$ ), dan p-values lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0.000 < 0.050$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa. Hasil ini sejalan dengan Giriani (2021), dimana Komitmen Organisasi merupakan salah satu faktor yang harus dimiliki seseorang dalam organisasi untuk mewujudkan Pengelolaan Dana Desa yang baik (Mada, 2017).

### **Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Hipotesis kelima ( $H_7$ ) diterima, nilai T-statistics lebih besar dari *critical value* ( $6.161 > 1.96$ ), dan p-values lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0.000 < 0.050$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa. Hasil ini sejalan dengan Pratama & Pratiwi (2022), dimana Transparansi berkaitan dengan adanya keterbukaan tentang kegiatan apa yang telah dilakukan oleh aparat desa dalam Pengelolaan Dana Desa termasuk keterbukaan tentang pelaporan atau pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan. Transparansi untuk masyarakat harus dibarengi dengan sarana & akses yang sama bagi seluruh masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah desa. Jika akses saluran ini diberikan oleh pemerintah desa maka sarana tersebut bisa dimanfaatkan untuk berperan serta & melakukan kontrol. Akses atau saluran ini perlu diadakan oleh pemerintah desa agar semua kelompok masyarakat desa mempunyai hak & kesempatan yang sama dalam memanfaatkan saluran tersebut (Indradi, 2017).

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini ialah Kompetensi Aparat Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi & Pengelolaan Dana Desa berpengaruh secara positif & signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa serta Variabel Pengelolaan Dana Desa mampu menjadi variabel mediasi. Implikasi penelitian ini bagi Pemerintah Desa, menjadi masukan bagi Aparat Desa dalam membuat keputusan untuk menentukan kebijakan publik terkait pentingnya untuk selalu meningkatkan Kinerja mereka dengan melihat Faktor-Faktor yang mempengaruhinya. Serta bagi Akademis, menjadi referensi tambahan & sumber informasi maupun sebagai bahan masukan terkait dengan faktor-faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa dimana hasil yang telah didapatkan ialah adanya pengaruh variabel Kompetensi Aparat Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi & Pengelolaan Dana Desa terhadap variabel Kinerja Pemerintah Desa serta variabel Pengelolaan Dana Desa mampu menjadi variabel mediasi.

## **REFERENSI**

- Ash-shidiqq, E.A dan Wibisono, H. 2018. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa". *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Vol. 4 No. 1, Tahun 2018
- Agustiningsih, M. (2019). Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Kabupaten Kampar. *PEKBIS*, 12(3).
- Alfasadun, Hardiningsih, P., Ratnasari, S., & Srimindarti, C. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Prosiding Sendiu* 18, 1, 978–979.

- Atmaja, I. K. (2019). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334-344.
- Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2020). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan faktor anteseden yang mempengaruhinya. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 145-159.
- Bawono, Incuk Rangga., Erwin Setyadi. 2019. *Panduan Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa*. Jakarta: PT Grasindo
- Diana dan Yayan Anggreani. 2020. Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Tunas Perkasa Tekindo. *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*. Volume 1 No. 2 Agustus 2020 e-ISSN : 2721-9062 p-ISSN : 2716-4152.
- Faridani, M. R., Roekhudin, R., & Adib, N. (2021). Does human resource knowledge moderate the effect of Good Governance and regional financial performance?. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 10(3), 189-201.
- Fitria, N., & Wibisono, N. (2020). Regulasi, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 3(2), 85-98.
- Hasibuan, S. N., Sebayang, A. F., & Sundaya, Y. (2019). Kesiapan Masyarakat Perdesaan dalam Mengelola Dana Desa (Studi Kasus: Desa Cibedug Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat).
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin, Hj.. (2017). *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan: Manajemen Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Public*.
- Kholifah, N. N. (2020). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Kinerja Pemerintah Desa Sebagai Mediasi (Studi Kasus pada Perangkat Desa di Kecamatan Sumber dan Kecamatan Rembang) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Kumalasari, D. R., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kebalandon. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1116-1122.
- Lengkong, V. P., & Tasik, H. H. (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (DP2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 5(1).
- Lubis, A. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa serta Dampak terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Deli Serdang (*Doctoral dissertation*).
- Mada, S., Kalangi, L., Gamaliel, H. (2017). "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo". *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, Vol 8, No, 106–115.
- Madhalena Giriani, Dahtiah, N., & Burhany, D. I. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat, Komitmen Organisasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Batujajar. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 480-492. Retrieved from <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/view/3038>
- Mardiasmo. 2018. *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Medianti, L. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kabupaten Bintan). *JOM FEB*, 1, 1–13.
- Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Muhammadiyah University Yogyakarta*
- Nurhazizal, M., Basri, Y. M., & Nasir, A. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi SDM Terhadap Kinerja Pemerintah Desa:

- Good Governance Sebagai Pemediiasi. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 8(1), 80-92.
- Pratama, D., Lestari, P., & Pratiwi, U. (2022, July). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Wilayah Kabupaten Banyumas Bagiantimur). In *Students Conference On Accounting and Business (SCoAB)* (Vol. 1, No. 01).
- Rahmawati, N. T., Nurhantari, Y., Widagdo, H., Agni, I. A. W., Suciningtyas, M., & Basworo, W. (2019). Karakteristik performance individu muda di Desa Ngablak dan hubungannya dengan penyalahgunaan NAPZA. *Journal of Community Empowerment for Health*, 2(1), 1-9.
- Rulyanti, D., Sularso, R. A., & Sayekti, Y. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11(3), 323-335
- Sari, Mawar dan Fatkhathul Masruroh. (2018). Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, Vol. 02 No. 02, Oktober 2018
- Sari, Rahmi & Mirna Indriani. (2018). Analisis Kinerja Pemerintah Desa dengan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Studi pada Desa di kecamatan Ingin Jaya kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Universitas Syiah Kuala
- Sukmawati, F. dan Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal dan UMKM*, 2(1), 52-66. retrieved from <https://ibn.e-journal.id/index.php/JIBPU/article/view/120>
- Sholihat, W., Sari, R. N., & Ratnawati, V. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ekonomi*, 25(4), 15.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88-98.
- Yateno. 2020. Prilaku Organisasi. YPKN Yogyakarta. Kota. Yogyakarta.
- Yesinia, dkk. 2018. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal Akuntansi Riset*. 10(1): 105-112.
- Yusrizal, Y., Iskandar, H., Zulkifli, Z., Asmara, R., Saputra, F., Basri, H., & Nasir, M. (2021). Penyuluhan Hukum Terkait Penggunaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Abdidias*, 2(3), 676-683.

### Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa